

Dok L. 03/ 19/01/2020

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Ambon Tahun 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Ambon, 19 Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, 19 Januari 2020

Kepala BBPPTP Ambon



Ir. Azwin Amir, MM

NIP. 196011301981031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2019 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BBPPTP Ambon Tahun 2019 ditetapkan Indikator Kinerja dengan target sebagai berikut : Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi benih Perkebunan dalam rangka Pemberian Sertifikat jumlah benih yang disertifikasi dengan target 500.000 batang dengan realisasi sebanyak 609.058 atau sebesar 121% benih bersertifikat/berlabel, dan Teknologi terapan perlindungan perkebunan sebanyak 12 paket dengan realisasi 100%.

Pagu alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 18.638.221.000 dan direvisi menjadi Rp. 18.978.001.000,- dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan lapangan (Pick Up). Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2019 sebesar Rp.18.693.238.915,- atau sebesar (98,50%).

Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut : realisasi Penanganan OPT Tanaman Perkebunan sebesar (99%), pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis komoditi Perkebunan sebesar (100%), Produksi pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebesar (91%), Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (98%), Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (99%), Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar (100%), Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar (89%), Layanan Perkantoran sebesar (99%).

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, namun masih banyak ditemui kendala/hambatan, yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain kurangnya pemahaman petani dalam penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel serta penerapan teknologi PHT dalam usaha perkebunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya yang ditempuh diantaranya melakukan pembinaan teknis kepada petani, penangkar, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	
2.1.1. Visi	4
2.1.2. Misi	5
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon.....	6
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon.....	8
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon.....	8
2.1.6. Program BBPPTP Ambon.....	11
2.1.7. Fokus Kegiatan BBPPTP Ambon.....	11

2.1.8. Strategi BBPPTP Ambon.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Pengukuran Kinerja.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.3. Realisasi Anggaran.....	29
3.4. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan..	31
3.5. Permasalahan Umum Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1. Permasalahan.....	35
4.2. Isu Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2019.....	11
Tabel 2	Capaian Kinerja Sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon.....	16
Tabel 3	Serapan Capaian Fisik BBPPTP Ambon.....	29
Tabel 4	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	30
Tabel 5	Capaian Output Kegiatan.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar areal perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon adalah perkebunan rakyat yang telah diwariskan turun-temurun, dibudidayakan secara tradisional, diusahakan skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, sedangkan sisanya merupakan perkebunan yang di kelola oleh perusahaan swasta/BUMN telah diusahakan dalam skala industri. Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan diperhadapkan dengan kendala antara lain kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang polikultur, sistem budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal pemanfaatannya maupun aksesibilitasnya, adanya serangan OPT, dampak gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak.

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah

lingkungan membuka peluang terhadap naiknya permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan. Dunia usaha perbenihan perkebunan juga semakin berkembang dalam menghasilkan beragam produk benih yang memberikan hasil yang bermutu dan memiliki produktivitas yang baik. Teknologi yang menghasilkan produk pestisida organik/biopestisida juga makin mengemuka karena tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan.

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan tidak lepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih tanaman perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas tanaman perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi.

Untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul bermutu (tepat varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi". Dalam

Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

2.1.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”**

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani
5. Mewujudkan peningkatan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan

8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi dan guna mendukung visi dan misi pembangunan tersebut diatas maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
- 2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.
- 3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).

- 4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
- 5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
- 6) Mengembangkan teknik dan metode *surveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.
- 7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
- 8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.
- 9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 13) Meningkatkan pelayanan organisasi

2.1.4. Sasaran

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah: “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan

proteksi tanaman perkebunan”. Kebijakan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.
- 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan

pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
- Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
- Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.

2.1.6. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

2.1.7. Fokus Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu penangangan OPT perkebunan, pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, memfasilitasi kegiatan sertifikasi benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), produksi benih dan penyaluran benih bersertifikat lewat pemanfaatan nursery modern dan meningkatkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan pelayanan organisasi yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2019

No	Kode Nama Kegiatan	Output
	1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan	
1	1779.001 Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	100 ha

2	1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan	8 Desa
1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan		
1	1781.001 Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	500.000 batang
2	1781.002 Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	12 paket
3	1781.003 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi proteksi Tanaman Perkebunan	12 Bulan
4	1781.950 Layanan Dukungan Manajelen Eselon I	1 Layanan
5	1781.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead)	1 Layanan
6	1781.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan

2.1.8. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan	Metode	4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah Metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dihasilkan	metode	9
4	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan	rekomendasi	3
5	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan	skala	1
6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah temuan BPK pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang	temuan	3
7	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah Temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi perencanaan, pengkuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup BBPPTP Ambon	temuan	5

Kegiatan : Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon Anggaran Rp. 18.978.001.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja BBPPTP Ambon disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis BBPPTP Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2019 sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon dan beberapa tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun									Kriteria Keberhasilan
			2017			2018			2019			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (Metode)	-	-		4	3	75	4	4	100	Berhasil
2	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (Paket Teknologi)	12	12	100	12	12	100	12	12	100	Berhasil
3	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah Metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dihasilkan (Metode)	-	-		9	7	77.7	9	9	100	Berhasil
4	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)	-	-		12	12	100	3	3	100	Berhasil
5	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (skala)	-	-		3	3	100	1	1	100	Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun									Kriteria Keberhasilan
			2017			2018			2019			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah temuan BPK pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang (temuan)	-	-		1	0		3	0	100	Berhasil
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah Temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi perencanaan, pengkuruan, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup BBPPTP Ambon	-	-		1	0		6	0	100	

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BBPPTP Ambon dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam PermenPAN&RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup

Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)
 - a. Capaian kinerja pengujian mutu benih sebanyak 4 metode yang dikembangkan dari target 4 metode dan masuk dalam kategori berhasil yaitu : Pengujian kadar air pada pala, pengujian kadar air cengkih, pengujian viabilitas benih, standarisasi daya berkecambah pala.
 - b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir kegiatan masih tetap sama untuk metode pengujian
 - c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah referensi acuan untuk pengembangan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan kurang tersedia sehingga perlu memperbanyak jumlah pengujian dan memvalidasi metode yang telah dikembangkan.
 - d. Analisis penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yakni petugas pengawas benih tanaman tersedia namun kompetensi dalam

melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembangan metode uji perlu ditingkatkan terus menerus.

2. Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (Paket Teknologi):
 - a. Capaian kinerja perakitan teknologi spesifik lokasi target 12 paket teknologi realisasinya 12 paket teknologi dan masuk dalam kategori berhasil
 - b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:
 1. Aplikasi metabolit sekunder *Trichoderma* sp. (500 ml/pohon) yang dikombinasikan dengan ekstrak daun sirih dan PGPR, dengan metode infus akar guna menekan intensitas serangan VSD pada tanaman Kakao.
 2. Aplikasi metabolik sekunder *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium anisopliae* dengan metode infus akar (500 ml/pohon) serta sanitasi, pemupukan, pemangkasan dan pengamatan OPT secara teratur untuk menekan intensitas serangan hama penggerek batang pada tanaman cengkih.

3. Pengendalian hama *Brontispa* sp (kumbang janur), dengan metode infus akar (500 ml/pohon) dan penyemprotan (500 ml/pohon) metabolit sekunder *Metarhizium anisopliae* dan *Beauveria bassiana* pada tanaman kelapa.
 4. Aplikasi infus akar metabolit sekunder jamur *Trichoderma* sp, *Beauveria bassiana* (500 ml/pohon) dengan metode infus akar pada tanaman pala untuk menekan intensitas serangan hama penggerek batang pala.
 5. Pengendalian hama *Coptocercus biguttatus* pada tanaman cengkih dengan metode infus akar *Beauveria bassiana* (200 ml/pohon).
 6. Aplikasi metabolit sekunder *Metharizum anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Trichoderma* sp dan bakteri *Pseudomonas* (1000 ml/pohon) untuk mengendalikan hama Tungau (*Aceria guerreronis*) pada Tanaman Kelapa
 7. Pengendalian penyakit busuk buah kakao dengan metode infus akar metabolit sekunder *Pseudomonas fluorescens*, *Trichoderma* sp dan pupuk organik cair.
 8. Pengendalian hama Penggerek Buah Kakao dengan metode infus akar metabolit sekunder *Pseudomonas*
-

fluorescens, *Beauveria bassiana* dan pupuk organik cair.

9. Pengendalian penyakit VSD dengan metode infus akar metabolit sekunder *Pseudomonas fluorescens*, *Trichoderma* sp dan pupuk organik cair.
10. Penanganan hama penggerek batang, cabang dan ranting dengan metode infus akar metabolit sekunder *Trichoderma* sp (250ml/pohon), *Beauveria bassiana* (250 ml/pohon), sanitasi, pupuk organik cair dan eradikasi.
11. Pengembangan metode eksplorasi, identifikasi dan koleksi bakteri endofit pada tanaman pala dan cengkih.
12. Pengembangan metode eksplorasi, identifikasi dan koleksi PGPR pada tanaman pala dan cengkih.

Bila dibandingkan dengan kegiatan tahun 2018 rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 12 paket teknologi sedangkan 2019 sebanyak 12 paket teknologi tidak ada perbandingannya terget 2018 dan 2019 sama

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah petani perlu diyakinkan untuk mengaplikasikan teknologi yang diperkenalkan

karena penggunaan biopestisida memerlukan waktu mulai dari tahap persiapan bahan, aplikasi di lapangan sampai dengan hasil yang diperoleh. Selain itu luas areal yang diaplikasikan terbatas pada demplot dan tidak dapat mewakili luas areal yang terserang OPT. Sebaiknya untuk mengendalikan OPT secara keseluruhan perlu pengendalian massal dan dilakukan secara berkelanjutan sampai tanaman pulih.

- d. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT.
3. Jumlah metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan
 - a. Capaian kinerja metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan sebanyak 9 metode dari target 9 metode dan masuk dalam kategori berhasil yaitu :
 - 1) Metode uji kerapatan spora agens pengendalian hayati golongan jamur
 - 2) Metode uji viabilitas spora agens pengendalian hayati

golongan jamur

- 3) Metode uji kandungan aflatoksin pada biji pala
 - 4) Metode uji residu pestisida golongan deltametrin
 - 5) Metode eksporasi, identifikasi, koleksi serangga OPT dan musuh alami
 - 6) Metode eksporasi, identifikasi, koleksi agens pengendali hayati golongan jamur
 - 7) Metode perbanyakkan NEP
 - 8) Metode Perbanyakkan APH golongan jamur (media cair, padat dan tepung).
 - 9) Metode pengamatan dan peramalan OPT
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu metode yang dihasilkan harus dilakukan validasi metode uji untuk mendapatkan metode standar.
- c. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT.

4. Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)
- a. Capaian kinerja rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan sebanyak 9 rekomendasi dengan realisasi sebanyak 10 rekomendasi dan masuk dalam kategori berhasil
 - b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2018 karena targetnya 7 rekomendasi, yakni :
 - 1) Sertifikasi benih tanaman perkebunan komoditi pala, cengkih dan kelapa dari target sebanyak 500.000 anakan, terealisasi sebanyak 609.058 anakan.
 - 2) Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman pala sebanyak 26 BPT, 215 PIT
 - 3) Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman cengkih sebanyak 11 BPT, 58 KI
 - 4) Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman kelapa sebanyak 2 BPT, 37 PIT
 - 5) Rekomendasi kelayakan produsen benih sebanyak 11 rekomendasi
-

- 6) Aplikasi metabolit sekunder *Trichoderma* sp. (500 ml/pohon) yang dikombinasikan dengan ekstrak daun sirih dan PGPR, dengan metode infus akar guna menekan intensitas serangan VSD pada tanaman Kakao.
 - 7) Aplikasi metabolik sekunder *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium anisopliae* dengan metode infus akar (500 ml/pohon) serta sanitasi, pemupukan, pemangkasan dan pengamatan OPT secara teratur untuk menekan intensitas serangan hama penggerek batang pada tanaman cengkih.
 - 8) Pengendalian hama *Brontispa* sp (kumbang janur), dengan metode infus akar (500 ml/pohon) dan penyemprotan (500 ml/pohon) metabolit sekunder *Metarhizium anisopliae* dan *Beauveria bassiana* pada tanaman kelapa.
 - 9) Aplikasi infus akar metabolit sekunder jamur *Tricoderma* sp, *Beauveria bassiana* (500 ml/pohon) dengan metode infus akar pada tanaman pala untuk menekan intensitas serangan hama penggerek batang pala.
 - 10) Aplikasi metabolit sekunder *Metarhizium anisopliae*,
-

Beauveria bassiana, *Trichoderma* sp dan bakteri *Pseudomonas* (1000 ml/pohon) untuk mengendalikan hama Tungau (*Aceria guerreronis*) pada Tanaman Kelapa

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah perubahan iklim yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan aplikasi di lapangan.
 - d. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT.
5. Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan
- a. Capaian kinerja rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan sebanyak 1 skala dengan realisasi sebanyak 1 skala
 - b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu lebih meningkat.

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah perubahan iklim yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan aplikasi di lapangan.
 - d. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT dan PBT
6. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang (temuan) targetnya 3 temuan realisasi 0 temuan.
7. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang yang targetnya 5 temuan realisasinya 0 temuan

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 18.638.221.000 dan direvisi menjadi Rp. 18.978.001.000,- dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan lapangan (Pick Up). Realisasi

penyerapan anggaran periode s/d Desember 2019 sebesar
Rp. 18.693.238.915,- atau sebesar (98,50%)

Tabel 3. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP
Ambon

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
001	Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	188.400.000	185.600.000	98,51	100
003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	1.145.414.000	1.145.129.800	99,98	100
001	Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	787.000.000	719.773.702	91,46	100
002	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	900.000.000	880.168.500	97,80	100
003	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	3.348.154.000	3.315.609.879	99,03	100
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.415.062.000	1.415.061.186	100	100
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	980.000.000	880.481.200	89,85	100
994	Layanan Perkantoran	10.213.971.000	10.151.407.009	99,39	100

Posisi Desember 2019

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 31,291,369,293,- atau sebesar (95,48%) bila dibandingkan dengan Realisasi penyerapan anggaran 2020 sebesar Rp. 18.693.238.915,- atau sebesar (98,50%) terdapat peningkatan realisasi dikarenakan semua kegiatan berjalan sesuai dengan target

Tabel 4. Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	9.451.484.000	9.394.136.825	99,39%
2	52 BELANJA BARANG	8.258.039.000	8.035.228.901	97,30%
3	53 BELANJA MODAL	1.268.478.000	1.263.873.189	99,64%

Sumber : (SMART Kemenkeu)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,39% dengan capaian fisik sebesar 100%.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar 97,30% dengan capaian fisik sebesar 100%.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 99,64% dengan capaian fisik sebesar 100%.

3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

Secara umum capaian output kegiatan BBPPTP Ambon adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - a) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 98,51 % dan capaian fisik sebesar 100%. Jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan sebanyak 100 orang mewakili 100 ha areal cengkih yang dikendalikan. Tingkat serangan menurun sebanyak 65%
 - b) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 99,98% dan capaian fisik sebesar 100%. areal yang diorganikkan seluas 754 ha, dari target 250 ha atau meningkat 300%. Jumlah petani yang terlibat 539 orang dari 8 ICS.
- 2) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
 - a) Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 91,46 % dan capaian fisik sebesar 100%, sertifikat mutu benih sebanyak 609.058 benih unggul bersertifikat berlabel cengkih Tuni 7 BPT dan 65 PIT,

cengkih Affo 7 BPT dan 143 PIT, Pala Banda 6 BPT dan 91 PIT yang ditetapkan sebagai kebun sumber benih.

- b) Modernisasi proteksi Tanaman Perkebunan serapan sebesar 97,80% dan capaian fisik sebesar 100%, dengan 12 paket teknologi terapan
- c) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 99,03% dan capaian fisik sebesar 100%
- d) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar 100 % dan capaian fisik sebesar 100%
- e) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan serapan sebesar 89,85% dan capain fisik sebesar 100%
- f) Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 99,39% dan capaian fisik sebesar 100%

Tabel 5. Capaian output kegiatan BBPPTP Ambon

No	Program / Kegiatan Utama			Anggaran (Rp)			Keluaran			Nilai Efisiensi
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1779	001	Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	188.400.000	185.600.000	98,51	100 ha	100 ha	100	53.72
	1779	003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	1.145.414.000	1.145.129.800	99,98	6 desa	8 desa	100	112.55
2	1781	001	Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	787.000.000	719.773.702	91,46	500.000 batang	609.058 batang	100	112.0
3	1781	002	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	900.000.000	880.168.500	97,80	12 paket teknologi	12 paket teknologi	100	55.51
4	1781	003	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	3.348.154.000	3.315.609.879	99,03	12 bulan	12 bulan	100	52.43
5	1781	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.415.062.000	1.415.061.186	100	12 bulan	12 bulan	100	50
6	1781	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	980.000.000	880.481.200	89,85	1 layanan	1 layanan	100	75.39
7	1781	994	Layanan Perkantoran	10.213.971.000	10.151.407.009	99,39	1 layanan	layanan	100	51.53

3.5 Permasalahan umum realisasi anggaran tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Belum adanya Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin	belum diatur dalam Permentan No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja BBPPTP Ambon	Pelaksanaan Kegiatan Mengalami kendala	Menambah Tupoksi BBPPTP Ambon khususnya Uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin	Revisi Permentan No 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BBPPTP Ambon	Kepala BBPPTP Ambon
2.	Perhatian petani terhadap usaha tani perkebunan masih belum maksimal karena petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun	petani masih kurang dalam mengadopsi teknologi pengendalian hama terpadu yang diterapkan oleh POPT	Tingginya intensitas serangan OPT	diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani	Demplot PHT	Kepala BBPPTP Ambon
3.	rendahnya tingkat pemahaman petani terhadap pentingnya penggunaan benih yang bersertifikat dan berlabel	Masih dijumpai di lapangan benih yang beredar belum bersertifikat dan berlabel	Penggunaan benih yang belum bersertifikat dan berlabel masih tinggi	Koordinasi yang dibangun untuk pengawasan peredaran benih sampai dengan tahun 2016, masih meliputi korwas PPNS, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten/kota dan Pengawas Benih Tanaman.	perlu adanya koordinasi pengawasan peredaran dengan instansi terkait seperti Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota, pengawas benih tanaman, korwas PPNS, aparat keamanan di tingkat desa sampai dengan provinsi, dan petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan serta petugas Karantina Pertanian	Kepala Bidang Perbenihan dan proteksi, Kepala Seksi Perbenihan
4.	Masih maraknya penangkar benih musimam yang tidak memiliki Ijin Produksi Benih, kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas	Penangkar belum memahami tentang aturan perbenihan	Beredarnya benih yang tidak bersertifikat dan berlabel	Sosialisasi dan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait	Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala BBPPTP Ambon
5.	masih banyak kebun sumber benih berupa Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang belum ditetapkan sebagai sumber benih	Penerapan Permetan No. 50 tahun 2015, yang mengatur penetapan sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan belum diantisipasi dengan baik oleh daerah,	Menyebabkan masalah dalam proses sertifikasi karena keberadaan sumber benih belum jelas	Dalam tahun anggaran 2016, BBPPTP Ambon telah memfasilitasi penilaian dan pengusulan penetapan sumber benih pala sebanyak 2 kebun dan kelapa sebanyak 22 kebun.	Hal ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas yang membidangi perkebunan untuk mengusulkan kebun sumber benih agar dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan	Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi
6.	Pengelolaan database perbenihan belum terlaksana dengan baik, mekanisme yang dibangun untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan perbenihan di wilayah kerja belum diatur	Tingkat pemahaman petugas pengamat dalam melakukan pendataan, pengolahan, pelaporan data OPT belum maksimal, tenaga pengamat tidak tersedia di semua lokasi kabupaten/kota oleh karena pemekaran wilayah, jangkuan wilayah pengamatan tidak sebanding dengan jumlah petugas di lapangan, disamping itu faktor usia tenaga pengamat yang dalam lima tahun ke depan memasuki batas usia pensiun	Hal ini mengakibatkan distribusi pengiriman data pengamatan OPT belum sesuai jadwal yang ditentukan, pengolahan data dan pelaporan mengalami keterlambatan	Penataan Database	-	Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi, Kepala Seksi Perbenihan, Kepala Seksi Proteksi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Permasalahan

1. Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin.

Dalam tahun 2019, BBPPTP Ambon telah melakukan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala dan kandungan residu pestisida deltametrin pada lada. Tenaga fungsional PMHP yang melaksanakan pengujian berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang PMHP Ahli muda dan 1 orang PMHP trampil pelaksana. Kendala yang dihadapi adalah sampai dengan saat ini, tugas fungsi BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian tersebut diatas belum diatur dalam Permentan No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja BBPPTP Ambon.

Pengujian kandungan aflatoksin dan residu pestisida yang dilaksanakan oleh laboratorium pestisida berawal dari kebutuhan daerah terkait dengan adanya penolakan pembeli dari negara-negara di Eropa karena adanya kandungan aflatoksin yang melebihi ambang batas yang disyaratkan. Disampingitu tidak tersedianya laboratorium penguji yang terakreditasi untuk melaksanakan pengujian tersebut di

provinsi Maluku. Akhirnya berawal dari serangkaian asesmen oleh Direktorat PPHP dan Dinas Pertanian provinsi Maluku maka dipilihlah laboratorium BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala.

Berdasarkan tuntutan konsumen terhadap pengujian kandungan residu pestisida, dan aflatoksin maka kedepan perlu adanya penambahan tugas dan fungsi BBPPTP Ambon di bidang pengujian tersebut.

2. Adopsi teknologi

Partisipasi petani masih kurang dalam mengadopsi teknologi pengendalian hama terpadu yang diterapkan oleh POPT. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas serangan OPT akibat tidak dilaksanakannya sanitasi, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemangkasan. Di lain pihak, perhatian terhadap usaha tani perkebunan masih belum maksimal karena petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun.

Petani lebih cenderung melihat hasil dari pada mengikuti proses, mengakibatkan lambatnya adaptasi teknologi tersebut.

3. Biaya operasional pengelolaan laboratorium benih dan proteksi

Seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis pengujian di laboratorium benih dan proteksi, maka biaya operasional pengujian makin meningkat. Alokasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengujian harus mengimbangi setoran PNBP. Perolehan PNBP berasal dari pengujian dan sertifikasi mutu benih, pengujian mutu APH dan pengujian kandungan aflatoksin. Masih rendahnya PNBP karena pengujian aflatoksin, residu pestisida, pengujian mutu APH dan pengujian mutu benih di laboratorium masih bersifat internal, sampel yang diambil oleh petugas untuk kepentingan pengembangan metode uji belum mencakup pelanggan eksternal.

4. Pengawasan peredaran benih lintas provinsi

Masih kurangnya respons produsen benih terhadap hasil sosialisasi peraturan perbenihan dan teknis pembibitan sesuai standar yang pernah dilaksanakan sehingga terlihat kegiatan produsen benih dibuat masih belum sesuai standar SNI; Pembibitan dibiarkan terbengkalai tidak terurus karena produsen kecewa terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembibitan yang tidak mengakomodir hasil pembibitan mereka seperti janji awal sebelum dilakukan pembibitan; Pohon Induk yang digunakan sebagai sumber benih belum bersertifikat, sumber benih berasal dari benih

unggul lokal yang menurut petani memiliki produksi tinggi; Rata-rata produsen belum memiliki ijin usaha produksi; Masih banyaknya masyarakat/petani belum memahami tentang mutu dan kualitas benih sehingga masih banyak benih yang beredar di masyarakat, benih yang tidak bermutu dan berkualitas. Terdapatnya peredaran benih yang tidak sesuai dengan standart mutu namun telah dilakukan pelabelan oleh instansi yang tidak berwenang.

Kegiatan PPNS di berbagai pintu keluar masuk benih di pulau Ambon, menunjukkan bahwa benih yang beredar masih banyak yang belum memiliki dokumen lengkap. Untuk meningkatkan penggunaan benih yang bermutu, bersertifikat dan berlabel, tindakan perbaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada produsen agar menggunakan benih yang terjamin mutunya, selain itu masalah yang dihadapi adalah Kegiatan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat yang membidangi perkebunan tidak sinkron/sinergis dengan UPT Pusat.

5. Produsen benih

Masih maraknya penangkar benih musimam yang tidak memiliki Ijin Produksi Benih, kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas, kurang paham mengenai

aturan perbenihan. Kedepan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait lainnya tetap dilaksanakan.

6. Kebun sumber benih

Penerapan Permetan No. 50 tahun 2015, yang mengatur penetapan sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan belum diantisipasi dengan baik oleh daerah, sehingga masih banyak kebun sumber benih berupa Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang belum ditetapkan sebagai sumber benih. Kedepan akan menjadi masalah dalam proses sertifikasi karena keberadaan sumber benih belum jelas.

Hal ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas yang membidangi perkebunan untuk mengusulkan kebun sumber benih agar dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

7. Pengelolaan database proteksi dan benih

Tingkat pemahaman petugas pengamat dalam melakukan pendataan, pengolahan, pelaporan data OPT belum maksimal, tenaga pengamat tidak tersedia di semua lokasi kabupaten/kota oleh karena pemekaran wilayah, jangkuan wilayah pengamatan tidak sebanding dengan jumlah

petugas di lapangan, disamping itu faktor usia tenaga pengamat yang dalam lima tahun ke depan memasuki batas usia pensiun.

Hal ini mengakibatkan distribusi pengiriman data pengamatan OPT belum sesuai jadwal yang ditentukan, pengolahan data dan pelaporan mengalami keterlambatan. Pengelolaan database perbenihan belum terlaksana dengan baik, mekanisme yang dibangun untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan perbenihan di wilayah kerja belum diatur. Hal ini mengakibatkan data terkini mengenai kebun induk, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih, produsen benih, jalur peredaran benih tidak mudah diperoleh.

8. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan

Tingkat pengetahuan dan pemahaman petani dalam menghasilkan sarana produksi berupa pupuk dan APH untuk pengendalian OPT secara mandiri masih belum optimal. Kebiasaan menerima bantuan secara gratis dari pemerintah mengakibatkan sulitnya membiasakan petani memproduksi sendiri sarana produksi.

Pemeliharaan ternak dalam kandang koloni tidak biasa dilakukan oleh petani, hal ini mengakibatkan tingginya tingkat

mortalitas hewan peliharaan. Perlu kerja keras untuk merubah kebiasaan petani dalam memelihara ternak dan memproduksi saprodi secara mandiri.

3.4 Isue Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti

a. Akreditasi Laboratorium

Kedepan tuntutan konsumen terhadap kualitas produk perkebunan yang di ekspor akan semakin ketat. Untuk mendukung hasil pengujian laboratorium yang diakui secara internasional apabila terjadi tuntutan/klaim dari konsumen, laboratorium penguji yang terakreditasi menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan. Untuk itu upaya balai untuk penambahan ruang lingkup akreditasi khususnya untuk pengujian residu pestisida, uji kandungan aflatoksin, dan uji mutu APH cair perlu didukung penyelesaiannya.

b. Penguatan SDM.

Sumberdaya manusia untuk menunjang tugas dan fungsi masih belum memadai, yaitu masih terbatasnya petugas Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengendali OPT, Tenaga Laboran, Petugas Pengambil Contoh. Kedepan perlu diusulkan untuk

penambahan tenaga teknis POPT, PBT, PMHP dan PPC, tenaga laboran, serta tenaga pengamat di lapangan.

c. Pengelolaan data base

Mekanisme pengelolaan database benih dan proteksi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, valid dan dapat dipercaya serta memudahkan pemangku kepentingan mengakses data lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan.

d. Adopsi teknologi proteksi tanaman perkebunan

Kedepan diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut dengan membangun lebih banyak demplot PHT untuk pengendalian OPT

e. Pembiayaan operasional laboratorium

Penerimaan PNBP dari pengujian laboratorium dan sertifikasi benih tanaman perkebunan perlu ditingkatkan dengan menjaring lebih banyak pelanggan eksternal. BBPPTP Ambon perlu meningkatkan promosi mengenai jenis pengujian dilaboratorium. Dengan demikian

diharapkan biaya operasional laboratorium dapat dibantu dari pengelolaan penerimaan PNBP.

f. Benih bersertifikat dan berlabel.

Pengawasan terhadap benih bersertifikat dan berlabel perlu ditingkatkan dengan mengurangi peredaran benih yang illegitim, meningkatkan jumlah produsen benih yang memiliki ijin produksi benih, meningkatkan jumlah kebun sumber benih (KI,BPT,PIT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Diharapkan tugas PPNS tidak sebatas peninjauan saja tetapi perlu kerjasama dengan membuat pos penjagaan demi menghindari proses peredaran benih tanaman perkebunan yang legal maupun ilegal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dilain pihak perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar peraturan perbenihan perkebunan, perlu membangun kerjasama dengan instansi terkait yang berada di wilayah kerja agar bisa mencegah peredaran benih palsu dan perlunya dibangun pos penjagaan di daerah yang sering terjadi peredaran dan guna memperancar proses penyidikan perlu dibuat format berita acara sebagai pegangan bagi petugas bila kedatangan keganjalan dalam proses peredaran benih

- g. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan

Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa organik, melakukan pendekatan persuasif ke kelompok tani sasaran untuk memproduksi sendiri saprodi.

